



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan bidang perhubungan merupakan salah satu kewenangan wajib dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - b. bahwa salah satu sub bidang perhubungan adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang perlu diatur tentang penyelenggaraannya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;
  7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
13. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya ( Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas atau Kantor adalah lembaga penyelenggara sistem transportasi jalan dan/atau urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas atau Kantor adalah Kepala Lembaga penyelenggara sistem transportasi jalan dan/atau urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tasikmalaya;
6. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
9. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
10. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
11. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
12. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang mempunyai lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
13. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang;
14. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
15. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
18. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
19. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
20. Bengkel Umum Kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat

kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

21. Jumlah Berat yang Diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
22. Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
23. Jumlah Berat yang Diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
24. Jumlah Berat Kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
25. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
26. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
27. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
28. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
29. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
30. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
31. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
32. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
33. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan;
34. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
35. Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
36. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
38. Kendaraan Derek adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan-persyaratan khusus untuk melakukan penderekan;

39. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
40. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang;
41. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
42. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
43. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
44. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
45. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif;

## BAB II NAMA, SUBJEK, DAN OBJEK

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan komponen sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari sarana, prasarana, pemakai jalan, dan lingkungan ;
- (2) Subjek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Instansi, Badan Hukum, dan Perorangan ;
- (3) Objek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalu lintas, dan komponen pendukung operasional lainnya.

## BAB III MANAJEMEN PRASARANA JALAN

### Bagian Pertama Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

### Pasal 3

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai dan terpadu dengan moda transportasi lainnya, Daerah menyusun Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat :
  - a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
  - b. Prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
  - c. Arah kebijakan transportasi jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
  - d. Rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini, meliputi rencana kebutuhan terminal penumpang dan terminal barang.

#### Pasal 5

Untuk mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu ditunjang Rencana Detail Transportasi Jalan yang meliputi kegiatan :

- a. Penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek dan jaringan lintas, penetapan wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar Daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, dan pengaturan pelayanan angkutan yang bersifat perintis disesuaikan dengan tata ruang;
- b. Mengusulkan rencana lokasi untuk Jaringan Jalan Negara kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem Jaringan Jalan Negara dan Jaringan Jalan Propinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem Jaringan Jalan Propinsi;
- c. Mengusulkan menetapkan rencana jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan dalam kesatuan jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi dan rencana jaringan trayek Antar Kota Dalam Propinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
- d. Mengusulkan penunjukan lokasi Terminal Penumpang tipe A kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Antar Propinsi dan terminal penumpang tipe B kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Dalam Propinsi;
- e. Perencanaan lokasi Terminal Penumpang Tipe C;
- f. Perencanaan lokasi Terminal Barang.

Bagian Kedua  
Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1  
Penetapan Kinerja Jaringan Jalan

Pasal 6

Terhadap setiap ruas jalan ditetapkan kinerja ruas jalan yang meliputi ketentuan : fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diijinkan, dan batas kecepatan yang diperbolehkan.

Pasal 7

Terhadap jalan yang dibangun oleh Badan Hukum yang merupakan jalan konsesi, jalan kawasan, atau lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 2  
Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan

Pasal 8

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui ;
  - a. Penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar;
  - b. Pengendalian pembukaan jalan masuk;
  - c. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Pasal 9

Penetapan garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 8 huruf a, berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengendalian pembukaan jalan dan pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 8 huruf b dan c, dilaksanakan melalui perijinan.

## Pasal 11

Badan Hukum dan/atau Perorangan dilarang membangun, membuka jalan masuk, dan/atau memanfaatkan tanah pada daerah milik jalan.

## Paragraf 3 Pengawasan Penggunaan Jalan

## Pasal 12

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pangangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

## Pasal 13

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah, dilengkapi dengan alat penimbangan.

## Paragraf 4 Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

## Pasal 14

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya ditetapkan :

- a. Bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. Bagian bahu jalan yang berfungsi untuk penyelenggaraan fasilitas lalu lintas dan fasilitas pejalan kaki;
- c. Ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

## Pasal 15

- (1) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, merupakan kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang harus dikendalikan.
- (2) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dapat diijinkan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional dan/atau Daerah serta kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diijinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup dan pengalihan arus ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.
- (4) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, Dinas / Kantor menempatkan petugas yang berwenang pada ruas



jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

- (5) Badan Hukum dan/atau Perorangan dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kecuali setelah mendapat ijin.

#### Paragraf 5

#### Dispensasi Jalan

#### Pasal 16

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas / Kantor dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya diatas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan atas:
  - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
  - b. Larangan dan/atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
  - c. Pengangkutan bersifat darurat.

#### Pasal 17

Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 16 huruf a, hanya dapat memasuki jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 16 setelah mendapat Ijin Dispensasi Jalan.

#### Pasal 18

Setiap pengusaha kendaraan yang mendapat ijin dispensasi, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Ijin Dispensasi Jalan, Walikota menetapkan dan membangun Pos Pengawasan yang dilengkapi dengan alat pembatas tinggi dan lebar.

#### Paragraf 6

#### Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 20

Setiap Pembangunan yang potensial menciptakan bangkitan atau tarikan perjalanan, wajib mempunyai rekomendasi teknis dari Dinas / Kantor.

## Pasal 21

- (1) Untuk menghindari terjadinya konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
  - a) Analisis terhadap sistem kegiatan yang direncanakan;
  - b) Perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
  - c) Analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
  - d) Analisis kebutuhan parkir;
  - e) Analisis kebutuhan fasilitas lalu lintas;
  - f) Analisis kinerja jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
  - g) Rencana penanggulangan dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas.
- (3) Analisis Dampak Lalu Lintas dibuat oleh Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan membangun pusat kegiatan.
- (4) Dinas / Kantor melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan menjadi syarat dikeluarkannya perijinan lokasi site plan dan/atau ijin bangunan.

## Pasal 22

Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perijinan lokasi site plan dan/atau ijin bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk.

## Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan dan Pengaturan Penggunaan Jalan yang meliputi : Penetapan Kinerja Jaringan Jalan, Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan, Pengawasan Penggunaan Jalan, Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas, Dispensasi Jalan, dan Analisis Dampak Lalu Lintas, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB IV  
TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Pertama  
Manajemen Lalu Lintas

Pasal 24

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, Daerah merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.

Pasal 25

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi kegiatan :
  - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
  - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
  - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
  - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas atau Kantor melakukan kajian lalu lintas.

Pasal 26

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
  - a) Pengaturan persimpangan;
  - b) Pengaturan sirkulasi lalu lintas;
  - c) Penetapan rute tertunjuk angkutan penumpang umum;
  - d) Penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
- (2) Pengaturan persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, adalah mengenai :
  - a) Desain persimpangan;
  - b) Jenis pengaturan persimpangan;
  - c) Kebutuhan fasilitas lalu lintas di persimpangan;
  - d) Pengaturan lain yang menyangkut teknis persimpangan.
- (3) Pengaturan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini adalah :
  - a) Penetapan lalu lintas satu arah dan dua arah;
  - b) Penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan/atau seluruh kendaraan;
  - c) Penetapan larangan berhenti dan/atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
  - d) Penetapan batas kecepatan lalu lintas kendaraan;
  - e) Pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.

- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan dalam Keputusan Walikota, dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 27

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

#### Pasal 28

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah menetapkan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas diatur oleh Walikota.

### Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
- a) Rambu-Rambu Lalu Lintas;
  - b) Marka Jalan;
  - c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d) Alat pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
  - e) Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan;
  - f) Fasilitas Pendukung.
- (3) Alat Pengendali dan Alat Pengaman Pemakai Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Pasal ini, terdiri dari :
- a) Alat Pembatas Kecepatan;
  - b) Alat Pembatas Tinggi dan Lebar;
  - c) Pagar Pengaman Jalan;
  - d) Cermin Tikungan;
  - e) Patok Pembatas Jalan;
  - f) Pulau-Pulau Lalu Lintas;
  - g) Pita Penggaduh;
- (4) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e Pasal ini, adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan

beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan/atau yang dapat dipindah-pindah.

- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f Pasal ini, meliputi :
- a) Tempat Pejalan Kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu, serta jembatan penyeberangan;
  - b) Fasilitas Parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan;
  - c) Tempat menurunkan dan/atau menaikan penumpang;
  - d) Tempat Istirahat;
  - e) Lampu Penerangan Jalan.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekayasa lalu lintas diatur oleh Walikota.

#### Bagian Ketiga

#### Parkir

#### Paragraf 1

#### Fasilitas Parkir

#### Pasal 32

- (1) Parkir diselenggarakan di tepi jalan, pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir.
- (2) Parkir di tepi jalan dilaksanakan pada badan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir dengan fasilitas khusus berupa pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, kawasan pendidikan dan/atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

#### Pasal 33

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 32 dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. Fungsi jalan yang digunakan;
- b. Pengaturan Satuan Ruang Parkir (SRP);
- c. Rambu-rambu peruntukkan parkir dan marka jalan;

#### Pasal 34

Fasilitas parkir yang diselenggarakan di pelataran parkir, gedung parkir dan/atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya.

- b. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan.
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan.

## Paragraf 2

### Penyelenggaraan Parkir

#### Pasal 35

- (1) Parkir di tepi jalan diselenggarakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas / Kantor.
- (2) Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan di pelataran parkir, gedung parkir, dan/atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau Perorangan yang telah mendapat ijin.

#### Pasal 36

Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan dilarang menyelenggarakan usaha parkir tanpa ijin.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir diatur oleh Walikota.

## Bagian Keempat

### Bongkar Muat Barang

#### Pasal 38

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang yang dilaksanakan di dalam kota, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukkannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditempatkan peruntukkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berupa pergudangan, pelataran, atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan bongkar muat, ditetapkan tempat dan waktu kegiatan, akses ke dalam kota, dan fasilitas untuk menunggu dan /atau istirahat.

#### Pasal 39

- (1) Kegiatan bongkar muat dilaksanakan setelah mendapatkan Ijin Bongkar Muat.

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan lainnya.

#### Pasal 40

Setiap kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang di dalam kota dan menggunakan jalan di luar jaringan lintas angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui Ijin Dispensasi Jalan.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan bongkar muat barang dan tata laksana perijinannya diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

#### Bagian Kelima

#### Terminal

#### Paragraf 1

#### Perencanaan Terminal

#### Pasal 42

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
  - a) penentuan lokasi;
  - b) Penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
  - c) Penentuan desain, tata letak, dan/atau fasilitas penunjang;
  - d) Penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
  - e) Pengembangan jaringan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikut sertakan Badan Hukum.

#### Paragraf 2

#### Pembangunan Terminal

#### Pasal 43

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, setelah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang sesuai tipe pelayanan terminal yang direncanakan.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
  - b) Rencana Umum Tata Ruang;
  - c) Kapasitas Jalan;
  - d) Kepadatan Lalu Lintas;
  - e) Keterpaduan dengan Moda Angkutan Lain;

- f) Kelestarian Lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikut sertakan Badan Hukum.

### Paragraf 3

#### Penyelenggaraan Terminal

#### Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas / Kantor.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi:
  - a) Pengelolaan;
  - b) Pemeliharaan;
  - c) Penertiban.

### Paragraf 4

#### Jasa Pelayanan Terminal

#### Pasal 45

Jasa Pelayanan terminal meliputi :

- a) Jasa naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan ;
- b) Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan ;
- c) Fasilitas parkir kendaraan selain tersebut dalam huruf b di atas, yang dinikmati oleh pengguna jasa.

### Paragraf 5

#### Kegiatan Usaha Penunjang Terminal

#### Pasal 46

- (1) Kegiatan usaha penunjang terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum dan/atau Perorangan setelah mendapat ijin.
- (2) Kegiatan usaha penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat berupa :
  - a) Usaha makanan dan minuman;
  - b) Usaha cinder mata dan bahan bacaan;
  - c) Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
  - d) Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
  - e) Usaha penjualan tiket angkutan;
  - f) Usaha penitipan barang;
  - g) Usaha pencucian kendaraan;
  - h) Usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan operasional terminal diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota

### BAB V

### PEMBINAAN TEKNIS KENDARAAN DAN PERBENGKELAN



Bagian Pertama  
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1  
Kendaraan Wajib Uji

Pasal 48

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

Pasal 49

Kendaraan yang dinyatakan sebagai kendaraan wajib uji berkala dalam Peraturan Daerah ini adalah kendaraan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Daerah merencanakan, membangun, dan memelihara gedung unit pengujian kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan pengujian mekanik.

Pasal 51

Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 terdiri dari :

- 1) Alat uji rem;
- 2) Alat uji gas buang;
- 3) Alat uji penerangan;
- 4) Alat timbang berat kendaraan beserta muatannya;
- 5) Alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
- 6) Alat uji standar kecepatan;
- 7) Alat uji kebisingan;
- 8) Alat uji lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 52

Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, harus dikalibrasi secara berkala.

Paragraf 3  
Tenaga Penguji

### Pasal 53

Tenaga pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari Penguji dan Tenaga Administrasi Pengujian.

### Pasal 54

Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diangkat oleh Walikota dari pegawai yang memiliki Sertifikat dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

### Pasal 55

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengujian, kewenangan tenaga penguji adalah :

1. Menentukan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
2. Menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi/belum lengkap;
3. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
4. Melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan/atau tidak lulus uji;
5. Menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
6. Menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
7. Mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan;
8. Memerintahkan uji ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
9. Memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
10. Membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan Dinas, Intansi, Badan Hukum Pemerintah dan Swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan;

### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Pengujian Berkala

### Pasal 56

Pelaksanaan Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan :

- a. Pengujian Berkala Pertama kali:
  1. Penerbitan Surat Pelaksanaan Pengujian;
  2. Pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk;
  3. Pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
  4. Pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;

5. Melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diijinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan, dan penetapan teknis lainnya;
- b. Pengujian Berkala Ulangan:
1. Pemeriksaan administrasi;
  2. Pemeriksaan fisik, komponen, kelengkapan, dan peralatan kendaraan;
  3. Pengesahan hasil uji;
  4. Pengetokan dan penyegelan tanda uji;
  5. Pengecatan tanda samping.

#### Pasal 57

- (1) Dinas / Kantor dapat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan yang berdomisili di luar Daerah setelah mendapat ijin dari Daerah dimana kendaraan tersebut berdomisili.
- (2) Pemilik kendaraan yang berdomisili di Daerah dapat melakukan pengujian berkala di luar Daerah setelah mendapat ijin dari Dinas / Kantor.

#### Paragraf 5 Tertib Penyelenggaraan Pengujian

#### Pasal 58

- (1) Dalam rangka ketertiban pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Dinas / Kantor memasang papan informasi tentang tata laksana pengujian;
  - b) Papan informasi tentang tarif dan/atau biaya uji yang harus dibayar oleh wajib uji;
  - c) Menyediakan kotak saran / pengaduan.
- (2) Papan informasi dan kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terjangkau setiap saat oleh pemohon.

#### Paragraf 6 Penilaian Kendaraan Bermotor

#### Pasal 59

Instansi Pemerintah, Badan Hukum dan/atau swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu dilakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.

#### Bagian Kedua Perbengkelan

#### Pasal 60

- (1) Untuk memperhatikan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh bengkel umum kendaraan bermotor.

#### Pasal 61

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 60 terdiri dari :
  - a. Bengkel konstruksi/karoseri;
  - b. Bengkel perawatan, perbaikan, dan suku cadang.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas / Kantor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Badan Hukum dan/atau Perorangan setelah mendapat ijin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis kendaraan dan perbengkelan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

### BAB VI PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

#### Bagian Pertama Pendidikan Mengemudi

#### Pasal 63

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

#### Pasal 64

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Perorangan.

#### Pasal 65

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan mengemudi dilaksanakan setelah mendapat ijin penyelenggaraan pendidikan mengemudi.

## Bagian Kedua Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

### Pasal 66

- (1) Sebagai upaya meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan, Dinas / Kantor menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui media elektronik, media cetak, pemasangan spanduk, dan tatap muka.

## Bagian Ketiga Pemindahan Kendaraan

### Pasal 67

Untuk keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.

### Pasal 68

- (1) Selain Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemindahan kendaraan di jalan dilaksanakan oleh Badan Hukum dan/atau Perorangan dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki ijin penyelenggaraan derek umum;
  - b. Memiliki tempat penyimpanan atau garasi kendaraan;
  - c. Kendaraan derek yang memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum yang tidak memiliki garasi, penyimpanan kendaraan bermotor yang dipindahkan dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### Pasal 69

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan derek umum dilakukan terhadap kendaraan yang tidak dapat dijalankan karena mengalami kerusakan teknis dan/atau mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan atau berdasarkan perintah petugas yang berwenang yang bersifat bantuan.

### Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pemakai jalan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## BAB VII PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Pertama  
Angkutan Orang

Pasal 71

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a Pengangkutan dengan kendaraan umum;
- b Pengangkutan dengan sepeda motor yang diusahakan;

Pasal 72

(1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang yang dilayani dalam :

- a) Trayek tetap dan teratur;
- b) Tidak dalam trayek.

(3) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, terdiri dari :

- a) Trayek Antar Kota Antar Propinsi;
- b) Trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
- c) Trayek Angkutan Perbatasan;
- d) Trayek Angkutan Kota.

(4) Tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, terdiri dari :

- a) Angkutan Taksi;
- b) Angkutan Sewa / Rental;
- c) Angkutan Sekolah;
- d) Angkutan Karyawan;
- e) Angkutan Pariwisata;

Pasal 73

(1) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b adalah pelayanan angkutan yang bersifat perintis.

(2) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a) Daerah operasi dibatasi pada daerah-daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum dan/atau pada jalan lingkungan;
- b) Jumlah kendaraan dibatasi;
- c) Bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan umum;
- d) Tersedia pangkalan kendaraan yang ditempatkan pada lokasi yang tidak menimbulkan masalah lalu lintas.

(3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, keberadaannya secara bertahap dikurangi dan digantikan dengan kendaraan angkutan umum.

#### Pasal 74

- (1) Setiap pengusaha angkutan penumpang umum harus memiliki pool kendaraan sendiri.
- (2) Pembangunan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mempunyai rekomendasi teknis dari Dinas / Kantor.

#### Bagian Kedua Angkutan Barang

#### Pasal 75

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang;
- b. Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan;

#### Pasal 76

- (1) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a adalah pengangkutan barang oleh kendaraan barang, baik berstatus umum maupun tidak umum, yang diselenggarakan dengan memungut bayaran maupun tidak memungut bayaran.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
  - a) Mempunyai Ijin Usaha Angkutan;
  - b) Mempunyai Ijin Bongkar Muat;
  - c) Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

#### Pasal 77

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b adalah pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
  - a) Memiliki Ijin Usaha Angkutan;
  - b) Dalam hal kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan khusus untuk mengangkut barang tertentu, harus memiliki Ijin Operasi Angkutan Khusus;
  - c) Kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
  - d) Barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

#### Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Bagian Ketiga  
Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek, Jaringan Lintas,  
Dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 79

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur dan pengangkutan dengan angkutan Taksi, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan barang, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang.

Pasal 80

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 79 memuat :
  - a) Kode trayek;
  - b) Lintasan Pelayanan atau rute yang harus dilayani;
  - c) Jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
  - d) Jenis pelayanan, proto tipe kendaraan dan warna dasar kendaraan;
  - e) Terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 79 memuat :
  - a) Ruang lingkup wilayah pelayanan;
  - b) Jumlah armada dan prototipe kendaraan.

Pasal 81

- (1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Analisa potensi faktor muatan;
  - b) Asal dan tujuan perjalanan;
  - c) Kondisi jalan;
  - d) Jenis pelayanan dan proto tipe kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan;
  - e) Jarak dan waktu tempuh;
  - f) Perhitungan tarif angkutan;
  - g) Ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas / Kantor menyelenggarakan survey angkutan umum dan evaluasi pelayanan angkutan.



## Pasal 82

Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 79 direncanakan dan ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. Kelas jalan yang dilalui;
- b. Ketersediaan terminal barang, tempat bongkar muat, dan/atau gudang;
- c. Jarak dan waktu tempuh;
- d. Lingkungan di sekitar jalan;

## Pasal 83

- (1) Terhadap perencanaan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal 79 Walikota :
  - a) Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi;
  - b) Mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
  - c) Menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi di dalam Daerah;
  - d) Melakukan kerjasama angkutan perbatasan.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini, meliputi:
  - a) Perencanaan dan penetapan jaringan trayek di daerah perbatasan;
  - b) Pembagian penetapan alokasi dan prototipe kendaraan untuk masing-masing daerah;
  - c) Perencanaan dan penetapan terminal perbatasan;
  - d) Pengawasan bersama di wilayah perbatasan;

## Pasal 84

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 83 huruf c dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukkan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah jumlah alokasi, jenis dan prototipe, dan warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi ijin prinsip apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

## Pasal 85

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan :
  - a) Atas permintaan pemilik kendaraan;
  - b) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

#### Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan, jaringan trayek, jaringan lintas, dan wilayah operasi taksi diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

### Bagian Keempat Perijinan Angkutan

#### Paragraf 1 Ijin Usaha Angkutan

#### Pasal 87

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan berusaha di bidang angkutan wajib memiliki Ijin Usaha Angkutan.
- (2) Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik angkutan barang maupun angkutan orang yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (3) Setiap pemegang ijin wajib:
  - a) Merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (bulan) sejak diterbitkannya Ijin Usaha Angkutan;
  - b) Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas / Kantor.
  - c) Melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Dinas / Kantor dan mendapatkan Kartu Ijin Usaha Angkutan untuk tiap-tiap kendaraan.
- (4) Kartu Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pasal ini, berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap kegiatan usaha dan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

#### Pasal 88

Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 87 dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a) Kegiatan usaha tidak dilaksanakan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b) Tidak melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas / Kantor.

#### Paragraf 2

#### Ijin Trayek

#### Pasal 89

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan melakukan angkutan orang dalam trayek tetap baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal wajib memiliki Ijin Trayek.
- (2) Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah ijin untuk menyelenggarakan angkutan orang yang pelayanannya dilakukan dalam trayek baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal.
- (3) Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk kepentingan pemantauan kegiatan usaha diterbitkan Kartu Pengawasan Ijin Trayek sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ijin Trayek.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan dan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

#### Pasal 90

Ijin trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal 89 dikeluarkan oleh Dinas / Kantor ;

#### Pasal 91

Ijin Trayek dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a) Masa berlaku ijin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- b) Kartu Pengawasan Ijin Trayek tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal habis masa berlaku dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.

#### Paragraf 3

#### Ijin Operasi

#### Pasal 92

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan melakukan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan khusus wajib memiliki Ijin Operasi.
- (2) Ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah ijin untuk menyelenggaraan angkutan orang yang pelayanannya tidak dalam trayek dan angkutan khusus untuk mengangkut barang tertentu.

- (3) Ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, terdiri dari :
- a) Ijin operasi Taksi
  - b) Ijin operasi angkutan sewa / rental
  - c) Ijin operasi angkutan pariwisata.
  - d) Ijin operasi angkutan karyawan
  - e) Ijin operasi angkutan sekolah
  - f) Ijin operasi angkutan khusus
- (5) Ijin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk kepentingan pemantauan kegiatan usaha diterbitkan Kartu Pengawasan Ijin Operasi sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ijin Operasi.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, memuat jenis pelayanan dan data kendaraan, berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

#### Pasal 93

Ijin Operasi untuk taksi yang sepenuhnya beroperasi di Daerah, angkutan sewa / rental, angkutan karyawan, angkutan sekolah, dan angkutan khusus beserta Kartu Pengawasannya diterbitkan oleh Dinas / Kantor;

#### Pasal 94

Ijin Operasi dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a) Masa berlaku ijin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- b) Kartu Pengawasan Ijin Operasi tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal habis masa berlaku dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.

#### Paragraf 4

#### Ijin Insidentil

#### Pasal 95

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan mengangkut orang yang menyimpang dari Ijin Trayek yang dimilikinya wajib memiliki ijin insidentil.
- (2) Ijin Insidentil adalah ijin untuk mengangkut orang yang menyimpang dari Ijin Trayek yang dimilikinya yang bersifat sewaktu-waktu.
- (3) Ijin Insidentil dalam wilayah kota dan/atau lintas kota/kabupaten dalam satu propinsi diterbitkan oleh Dinas / Kantor.
- (4) Ijin insidentil berlaku selama-lamanya 14 (empat belas) hari.

#### Paragraf 5

#### Rekomendasi Teknis untuk

Ijin Trayek Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi

## Pasal 96

- (1) Rekomendasi Teknis untuk Ijin Trayek Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi adalah rekomendasi mengenai pertimbangan kelayakan teknis diterima atau tidaknya permohonan Ijin Trayek Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi dari dan/atau ke terminal dalam Daerah.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sekurang – kurangnya memuat pertimbangan teknis sebagai berikut :
  - a. Bidang Lalu Lintas yang menyangkut : volume lalu lintas, kepadatan lalu lintas, kapasitas dan kondisi teknis ruas jalan, jarak tempuh, dan waktu tempuh trayek yang dimohon;
  - b. Bidang Angkutan yang menyangkut : Kondisi Terminal, Rencana Daftar Waktu Perjalanan (DWP), Faktor muat kendaraan, nama perusahaan dan jumlah armada yang telah melayani trayek dimohon, dan trayek yang bersinggungan,
  - c. Bidang Pengusahaan yang menyangkut : Persyaratan usaha angkutan (pool/garasi, domisili dan lain-lain) sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan, antisipasi terhadap kerawanan sosial/ekonomi yang mungkin timbul dari pengusaha lain yang telah ada.

## Paragraf 6

### Tertib Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan

## Pasal 97

- (1) Dalam rangka ketertiban pelayanan perijinan angkutan, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dinas / Kantor memasang papan informasi tentang tata laksana perijinan angkutan dan tarif dan/atau biaya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon ijin;
  - b. Menyediakan kotak saran / pengaduan.
- (2) Papan informasi dan kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terjangkau setiap saat oleh pemohon.

## Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana perijinan angkutan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## Bagian Kelima

### Tarif

#### Pasal 99

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan umum.

#### Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan tarif dasar dan tarif jarak untuk angkutan kota dan angkutan perbatasan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

### BAB VIII

#### KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

#### Pasal 101

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari becak dan delman.

#### Pasal 102

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterbitkan surat tanda kepemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor

#### Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

### BAB IX

#### RETRIBUSI

#### Pasal 104

Segala jenis retribusi dan/atau pungutan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### BAB X

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 105

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas / Kantor melakukan pengawasan dan pengendalian.

#### Pasal 106

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 105, meliputi pemantauan, pemberian arahan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas / Kantor, dan dapat mengikut sertakan instansi lainnya.
- (3) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.

#### Pasal 107

Pelanggaran yang ditindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 106. meliputi :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendali lalu lintas lainnya;
- b. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Pelanggaran terhadap emisi gas buang;
- d. Pelanggaran terhadap ketentuan perijinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pelanggaran terhadap kelebihan muatan;
- f. Pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

#### Pasal 108

Selain pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas / Kantor sebagaimana tersebut pada Pasal 105 di atas, dibentuk Badan Koordinasi Lalu Lintas untuk meningkatkan peran serta masyarakat, dan untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan lalu lintas.

#### Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 110

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 111

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lalulintas daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggara lalulintas ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggara lalulintas;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggara lalulintas;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang lalulintas daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggara lalulintas ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang lalulintas menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan



ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 112**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Disahkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 6 Mei 2003

**WALIKOTA TASIKMALAYA**

Ttd.

**H. BUBUN BUNYAMIN**

Diundangkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 7 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

Ttd.

**H. ADIL DARMAWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 110 019 475

**LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR : 10 SERI E**